

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.
Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.

ASPEK KEBIJAKSANAAN HUKUM PENATAGUNAAN TANAH DAN PENATAAN RUANG



Penerbit

SINAR GRAFIKA

ASPEK KEBIJAKSANAAN HUKUM PENATAGUNAAN TANAH DAN PENATAAN RUANG

Kebijaksanaan memiliki orientasi guna menyelesaikan masalah tertentu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu. Dalam proses kebijaksanaan hendaknya dipertimbangkan segala sumber dana dan sumber daya lingkungan serta dipertimbangkan pula sarana yuridis pemerintahan, sehingga bila mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan segera memperoleh solusi. Kebijakan publik bersifat mengikat bagi warga negara yang berarti setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Hubungan penatagunaan tanah dengan penataan ruang, yakni penataan tanah merupakan subsistem dari penataan ruang yang harus disusun dalam wujud suatu neraca atau suatu dokumen tertulis yang dilengkapi peta *spasial eksisting* (berwujud) yang substansinya memuat ketersediaan sumber daya tanah maupun sumber daya lainnya dibandingkan dengan kebutuhan sumber daya tanah baik perorangan, badan hukum maupun pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Tentu saja dipersyaratkan adanya pembakuan standar pengumpulan, penyajian, analisis maupun perubahan data sebagai bahan utama penyusunan neraca penatagunaan tanah.

Hasil karya yang berkualitas ini menguraikan dengan detail mengenai aspek kebijaksanaan, hukum penatagunaan tanah dan ~~penataan ruang~~ meliputi kebijakan (konsepsi, orientasi, dan karakteristik); konsepsi dan arah kebijakan pertanahan; hukum dalam konteks perubahan sosial; landasan dan pola penerapan kebijaksanaan tata guna tanah; kebijaksanaan manajemen tanah perkotaan sebuah keniscayaan; epilog sisi kefilsafatan dan teori hukum pengaturan penataan ruang; serta dilengkapi dengan peragaan dan tabel.

ISBN 979-007-231-7



9 789790 072312

Aspek Kebijaksanaan
Hukum Penatagunaan Tanah
Dan Penataan Ruang

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	vii
Kata Pengantar	ix
Prakata	xi
 Bab 1 Kebijakan: (Konsepsi, Orientasi, dan Karakteristik)	 1
A. Konsepsi Kebijakan	1
B. Orientasi Kebijakan	5
C. Karakteristik Kebijakan	8
 Bab 2 Konsepsi dan Arah Kebijakan Pertanahan ...	 10
A. Keterpaduan Konsepsi Pembangunan Pertanahan	12
B. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanahan	16
 Bab 3 Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial	 28
A. Pokok-Pokok Pemikiran Mengenai Hukum	31
B. Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat	41

Bab 4	Landasan dan Pola Penerapan Kebijakan Tata Guna Tanah	44
A.	Landasan Awal Kebijakan Tata Guna Tanah	44
B.	Penatagunaan Tanah	46
C.	Contoh Implementasi Kebijakan Tata Guna Tanah di Jawa Timur	52
D.	Formula Normatif Tata Guna Tanah dan Pemukiman Perkotaan	55
E.	Sejarah Pengaturan tentang Penatagunaan Tanah dan Komponen-Komponen Penatagunaan Tanah	65
F.	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Timur dan Komponen-Komponen ATLAS	90
G.	Pelaksanaan Kebijakan Penatagunaan Tanah	102
Bab 5	Kebijakan Manajemen Tanah Perkotaan Sebuah Keniscayaan	113
Bab 6	Epilog Sisi Kefilsafatan dan Teori Hukum Pengaturan Penataan Ruang	124
A.	Pengantar	124
B.	Rasionalitas Urgensinya	127
C.	Aspek Filsafati (Hukum) Atas UU No. 26 Tahun 2007	131
D.	Pendekatan Hermeneutika Hukum Atas UU No. 26 Tahun 2007	133
E.	Aspek Filsafati (Hukum) Atas PP No. 16 Tahun 2004	136
F.	Keterkaitan Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang	138

G. Arti Penting Reforma Manajemen Pertanahan	143
Daftar Pustaka	151
Lampiran-Lampiran	163
Tentang Penulis	307